

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. LKPD yang telah disusun oleh pemerintah daerah setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 pasal 2 tentang BPK dijelaskan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK berupa opini audit, temuan audit, kesimpulan audit, maupun rekomendasi yang dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Dalam IHPS BPK, tentang Jenis

Opini, opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dasar opini Tidak Memberikan Pendapat adalah karena BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan juga menyebabkan pemerintah daerah sangat kurang mampu menyediakan dana untuk membiayai pembangunan daerah. Ketika APBD terlalu mengandalkan dana perimbangan, maka perkiraan belanja dapat meleset, karena penerimaan pendapatannya berubah-ubah yang mungkin salah satunya diakibatkan oleh penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga akan mengakibatkan pemotongan anggaran dan mengganggu kinerja pemerintah daerah tersebut.

TABEL 1.2. DAFTAR OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

No.	Kabupaten/Kota	Opini Audit BPK		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Bandar Lampung	WTP	WTP	WTP
2	Lampung Barat	WTP	WTP	WTP
3	Lampung Selatan	WDP	WTP	WTP
4	Lampung Tengah	WDP	WTP	WDP
5	Lampung Timur	WDP	WDP	WDP
6	Lampung Utara	WTP	WTP	WTP
7	Mesuji	WTP	WTP	WTP
8	Metro	WTP	WTP	WTP
9	Pesawaran	WDP	WTP	WTP
10	Pesisir Barat	TMP	WDP	WDP
11	Pringsewu	WTP	WTP	WTP
12	Tanggamus	WTP	WDP	WTP
13	Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP
14	Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP
15	Way Kanan	WTP	WTP	WTP

Sumber : www.bpk.go.id

Dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diterbitkanlah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini dan laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 sebanyak 10 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sisanya sebanyak 4 kabupaten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 kabupaten mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 sebanyak 3 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah dan Kab. Pesawaran. Kab. Pesisir Barat juga mengalami peningkatan dari opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan Kab. Tanggamus mengalami penurunan dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan sedangkan kemakmuran, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK berpengaruh pada kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2017) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, temuan dan opini audit BPK berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Sijabat (2016) menunjukkan bahwa opini, temuan audit dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia, sedangkan kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini megacu pada penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016) mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan Masdiantini (2016) adalah obyek penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan periode penelitian yaitu 2015-2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, TEMUAN DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN”**. Dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2015-2017.
2. Variabel bebas yang digunakan adalah Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Pusat, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten/kota terutama dalam hal penyelenggaraan kinerja keuangannya. Dengan demikian dapat menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan yang diambil.
2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bahan informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi Akademis, penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya tentang variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah kabupaten/kota.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, referensi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka penelitian.

LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi tentang lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian dan hasil olahan data menggunakan program SPSS versi 20.